



Bertempat di Gedung Pusat Bank Indonesia Jakarta, Rektor Universitas Bung Hatta Prof.Dr. Niki Lukviarman, SE.,Akt.,MBA beserta 10 Rektor Perguruan Tinggi lainnya se-Indonesia menandatangani naskah kerjasama dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Senin, (17/11/14). Kerjasama antarlembaga tersebut berfokus pada edukasi bank sentral.

Penandatanganan MoU tersebut, sekaligus dibarengi dengan peresmia peluncuran Buku Pengantar Kebanksentralan : Teori dan Praktik di Indonesia. Dengan ditandatanganinya 10 MoU tersebut, tercatat sudah 72 Perguruan Tinggi se Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, dengan ruang lingkup antara lain, kerjasama pelatihan, bantuan penelitian, edukasi kebanksentralan, kuliah umum, training of trainer (ToT) dan bidang pendidikan lainnya.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, MoU yang baru saja ditandatangani dengan 10 Perguruan Tinggi akan segera menyelenggarakan kuliah umum dan beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi di masing-masing perguruan tinggi.

Mata kuliah kebanksentralan, sangat penting di ajarkan di perguruan tinggi, dengan adanya mata kuliah tersebut diharapkan para lulusan Fakultas Ekonomi dapat berperan secara lebih berkualitas dalam menjaga makro ekonomi, apapun profesi lulusan nantinya , ujar Agus

Ditambahkan Agus, pihaknya telah meminta semua kantor wilayah Bank Indonesia di daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan semua perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu Rektor UBH, Prof.Niki Lukviarman menyebutkan, bahwa sebelum MoU tersebut ditandatangani, Fakultas Ekonomi UBH beberapa waktu yang lalu telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) kurikulum pendidikan dengan tema "Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten dan Berkarakter Dalam Memperkuat Daya Saing."

Acara tersebut dihelat di aula serbaguna kantor Perwakilan Bank Indonesia Regional VIII Padang, dengan mengundang para ekonom untuk mendapatkan masukan profesional dalam penyusunan kurikulum terbaru Fakultas Ekonomi jelas Niki.

Menurutnya lagi, para pakar dan praktisi tersebut diminta memberi masukan dan saran untuk menyusun dan merancang kembali kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional.

"Melalui FGD tersebut, kami mencoba menentukan profil lulusan, kompetensi yang harus dimiliki serta menetapkan struktur kurikulum yang mencerminkan kompetensi utama, pendukung lainnya yang terangkum dalam SKS yang ditawarkan tiap semesternya," imbuh Niki. (**Indrawadi-Humas UBH).